



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HERMAWAN SUKMAJATI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
3. NHK : 113665

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.250.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.360.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.311 m2/80 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 1.271 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 1.819 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 1.619 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **165.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **34.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	250.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	770.872.104
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.469.872.104
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.469.872.104

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.